

BAB I PENDAHULUAN

I.1 KONDISI UMUM ORGANISASI

Biro Hukum, Organisasi dan Humas Badan Standardisasi Nasional (Biro HOH) dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala BSN Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional. Biro HOH merupakan unsur penunjang Badan Standardisasi Nasional yang berkedudukan dibawah koordinasi Sekretaris Utama. Biro HOH mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN dalam menyediakan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, melakukan pengelolaan sumber daya manusia, serta memberikan informasi, dokumentasi dan publikasi tentang BSN.

Berdasarkan Pasal 25 Keputusan tersebut, Biro HOH-BSN mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penelaahan hukum, perumusan dan penyusunan peraturan perundangan, pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, analisis dan penataan kelembagaan, pengawasan dan evaluasi manajemen mutu internal, urusan kepegawaian, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga serta penyusunan laporan.

LAKIP Biro HOH Tahun 2017 merupakan bentuk dokumen pertanggungjawaban berdasarkan pada Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Biro HOH ini disusun dengan memperhatikan berbagai kondisi dan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang timbul dan mungkin akan timbul (deteksi dini) yang menyangkut kondisi internal dan eksternal baik regional, nasional maupun Internasional.

Selanjutnya dengan tersusunnya LAKIP Biro HOH, maka diharapkan dapat :

1. Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Biro HOH.
2. Meningkatkan komitmen dan kerjasama baik dengan unit eselon II lingkup kesestamaan maupun seluruh unit kerja yang ada dilingkungan BSN. Sehingga kerjasama dengan manajemen kinerja berjalan dengan sebagaimana yang diharapkan, mencakup perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja hingga evaluasi kinerja.
3. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dengan baik dan benar serta transparan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat.

A. KELEMBAGAAN

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Biro HOH BSN. Kelembagaan menyangkut aspek tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

A.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Biro HOH BSN

Dalam hal ini, tugas pokok dan fungsi, serta organisasi Biro HOH BSN adalah sebagai berikut.

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Biro HOH BSN mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penelaahan hukum, perumusan dan penyusunan peraturan perundangan, pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, analisis dan penataan kelembagaan, pengawasan dan evaluasi manajemen mutu internal, urusan kepegawaian, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga serta penyusunan laporan.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Biro HOH BSN menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan analisa, pengkajian, penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan dokumentasi dan pemberian informasi hukum;
- c. Pelaksanaan pemberian bantuan dan penyuluhan hukum;
- d. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan pegawai;
- e. Pelaksanaan penataan, evaluasi dan perumusan organisasi dan tata laksana serta pengawasan dan evaluasi manajemen mutu internal;
- f. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

b. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN Nomor 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN, struktur organisasi Biro HOH BSN terdiri dari :

Bagian Hukum Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, analisis, pengkajian, penelaahan peraturan perundang-undangan, urusan dokumentasi dan pemberian informasi hukum serta bantuan dan penyuluhan hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisa dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan bantuan dan penyuluhan hukum;
- c. pelaksanaan dokumentasi dan pemberian informasi Perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam

pengembangan Hukum dan Perundang-undangan di bidang standardisasi.

Bagian Organisasi dan Kepegawaian Bagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan analisis, penataan organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan evaluasi penerapan manajemen mutu internal, serta melaksanakan urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.

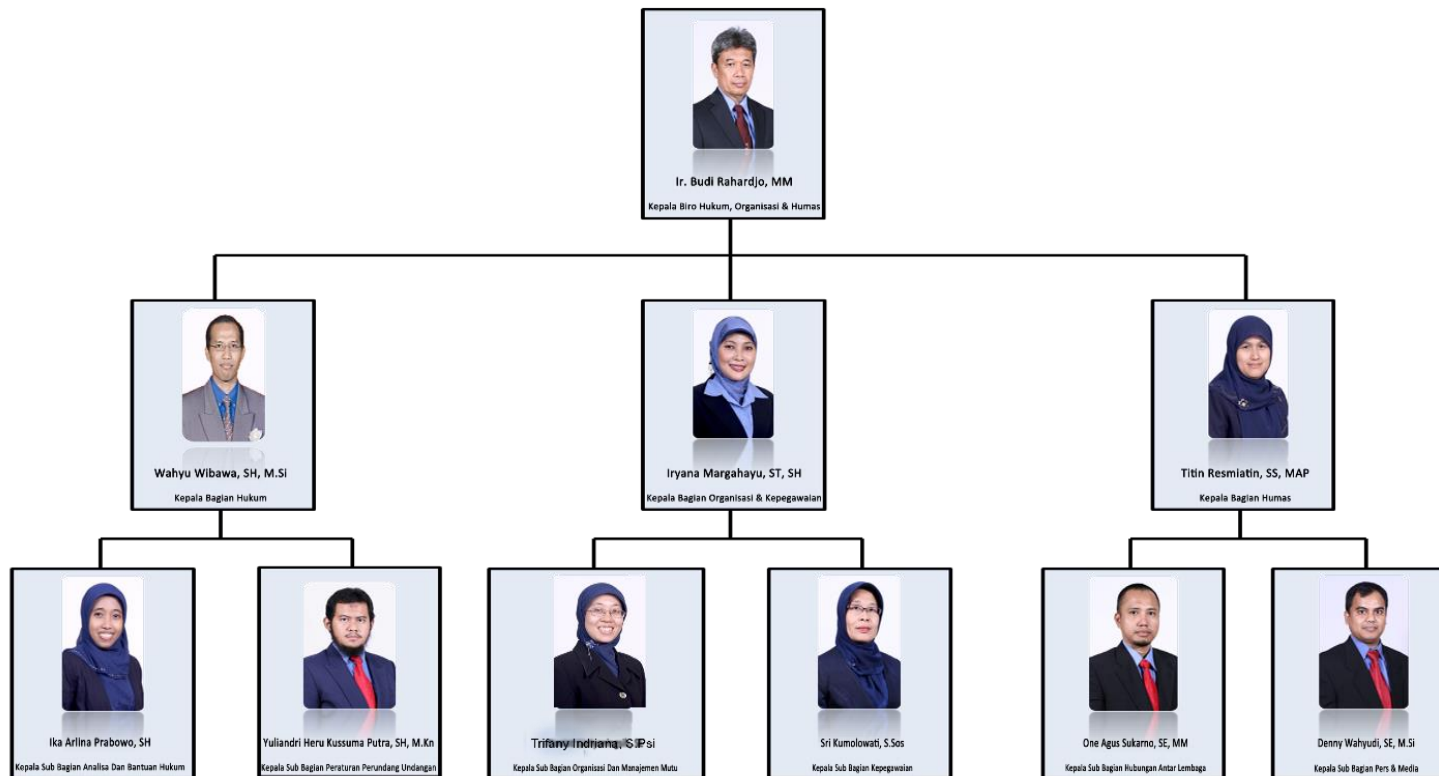
Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Organisasi dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan analisa, evaluasi dan perumusan struktur organisasi dan tata laksana;
- b. pengawasan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan Manajemen Mutu Internal;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.

Bagian Humas Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga serta dokumentasi dan publikasi kegiatan Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Humas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- b. pelaksanaan urusan hubungan antar lembaga;
- c. pelaksanaan urusan hubungan pers dan media massa;
- d. pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi.



Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Hukum, Organisasi, dan Humas

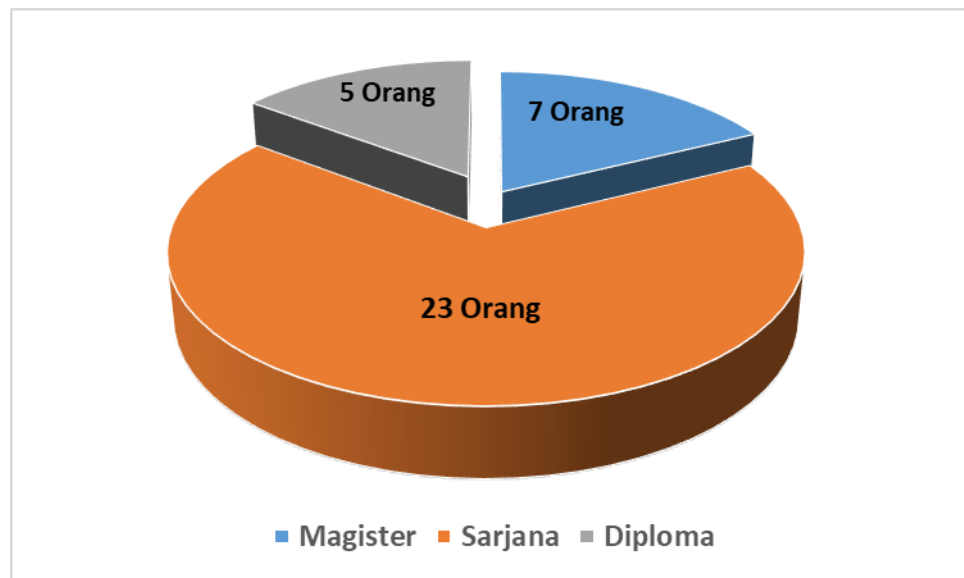
B. Sumber Daya Manusia Biro HOH BSN

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2016 Biro HOH BSN memiliki personel sebanyak 33 orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel B.1 Pegawai Biro HOH

No	Unit Kerja	Jumlah Orang
1.	Kepala Biro	1
2.	Bagian Hukum	8
3.	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	14
4.	Bagian Hubungan Masyarakat	11
	Jumlah	34

Grafik B.1 Jenjang Pendidikan SDM Biro HOH



Tabel B.2 Kualifikasi Kepangkatan berdasarkan Usia

Umur (tahun)	Jumlah (orang)	Pangkat dan Golongan									
		IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c
56 - 60	1	1									
51 - 55	3		1	1		1					
46 - 50	0										
41 - 45	5			2	1	2					
36 - 40	4				1		1	2			
31 - 35	11						1	5	4	1	
26 - 30	8							1	4	2	1
Jumlah	32										

C. PERAN STRATEGIS BIRO HOH BSN

Biro HOH sebagai unsur penunjang BSN mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, di bidang legislasi, pengelolaan sumber daya manusia, dan kehumasan.

I.2 PERMASALAHAN UTAMA

Pada Tahun 2017 Biro Hukum, Organisasi, dan Humas menghadapi tantangan yang cukup besar dengan tidak tercapainya beberapa target yang telah ditetapkan pada Penetapan kinerja Biro HOH Tahun 2017 antara lain :

1. Adanya kebijakan pemerintah melalui Instruksi Presiden No. 4/2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 sehingga pagu anggaran Biro HOH yang semula Rp. 13.239.344.000 menjadi Rp. 12.088.623.000 atau mengalami Efisiensi sebesar 9%
2. Belum ditetapkannya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian menjadi Peraturan Pemerintah (PP). Hal ini disebabkan draft tersebut masih dalam proses pamarafan di Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebelum dikirimkan kembali ke Menteri Sekretaris Negara untuk proses penetapan oleh Presiden RI.

3. Belum terselesaikannya struktur organisasi BSN yang baru sebagai Implementasi amanah UU No. 20 Tahun 2014. Saat ini Draft Perpres tentang Organisasi Badan Standardisasi Nasional sudah diparaf oleh Menteri terkait dan sedang menunggu penandatanganan oleh Presiden.
4. Belum selesainya rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Kebijakan Nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Hal tersebut dikarenakan masih diperlukan pembahasan intensif di internal BSN sebelum diusulkan ke Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk ditetapkan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam upaya mencapai sasaran strategis Biro HOH BSN seperti yang tertera dalam Rencana Strategis periode 2010-2015, maka Biro HOH BSN menetapkan arah kebijakan strategis sebagai acuan langkah-langkah penyusunan target outcome program dan target output kegiatan. Sejalan dengan itu maka dirumuskan visi dan misinya sebagai berikut:

Rencana Strategis Biro HOH BSN 2015 - 2019 secara rinci diuraikan sebagai berikut.

VISI

“Menyediakan SDM Profesional , Informasi aktual kelembagaan, dan peraturan Perundang-undangan yang implementatif”

MISI

1. Merencanakan dan mengadakan SDM sesuai dengan kebutuhan BSN secara transparan dan akuntabel;
2. Memberikan pelayanan prima dibidangi kepegawaian .
3. Memfasilitasi reformasi birokrasi secara berkelanjutan;
4. Menyusun peraturan perundang-undangan dibidang standardisasi;
5. Menyediakan dokumentasi dan informasi hukum;
6. Meningkatkan pengetahuan masyarakat, terutama stakeholder terhadap BSN;
7. Memperluas jaringan kemitraan yang mendukung pencitraan lembaga.

TUJUAN

Mewujudkan tata kelola peraturan perundangan dibidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, SDM yang berkualitas serta informasi kelembagaan yang akurat dan akuntabel.

SASARAN

Pada tahun 2017 sasaran Biro HOH BSN adalah :

1. Terwujudnya good governance dan clean.
2. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas produk hukum.
3. Terlaksananya Manajemen ASN BSN untuk mewujudkan SDM yang Profesional
4. Terselenggaranya program penataan Organisasi dan Tata Laksana sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi.
5. Tersedianya peraturan perundangan-undangan dibidang SPK.
6. Terselenggaranya layanan Pengembangan Hukum, Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum.
7. Terinformasikannya Kebijakan, Program, Kegiatan dan Hasil - Hasil BSN Kepada Masyarakat.
8. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi HOH yang profesional

PROGRAM

1. Program Pengembangan Standardisasi Nasional;
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN;

II.2 PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja merupakan pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Berikut adalah penetapan kinerja Biro HOH BSN tahun 2017 berdasarkan sasaran yang telah disempurnakan untuk memenuhi perspektif *stakeholder* :

Tabel II.2 Penetapan Kinerja Biro HOH BSN Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2017
CUSTOMER PERSPECTIVES			
1.	Terwujudnya good governance dan clean government	1. Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi	80 nilai
		2. Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan HOH (skala 1-5)	3,7 Nilai
2.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas produk hukum	3. Jumlah peraturan perundang - undangan di bidang SPK	3 dokumen
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVES			
3.	Terlaksananya Manajemen ASN BSN untuk mewujudkan SDM yang Profesional	4. Persentase pemenuhan kebutuhan ASN BSN	80 %
		5. Jumlah Dokumen Pengukuran Kompetensi ASN BSN	2 dokumen
		6. Persentase pelaksanaan program peningkatan kompetensi personel BSN untuk mendukung pencapaian kinerja BSN	100 %
		7. Jumlah SOP Pengelolaan Kepegawaian	8 Pedoman/ SOP
		8. Presentase ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	90%
		9. Presentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis	90%
		10. Prosentase ASN dengan Nilai Prestasi kerja lebih dari cukup tanpa ada unsur perilaku kerja yg bernilai cukup	95%
		11. Jumlah Dokumen Pembentukan JFT Analisis Standardisasi	1 Dokumen
		12. Persentase Penetapan Kenaikan Pangkat	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2017
		13. Persentase pegawai yg mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala	100%
		14. Persentase penyelesaian Usulan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Tertentu (JFTI)	100%
4.	Terselenggaranya program penataan Organisasi dan Tata Laksana sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi	15. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi	100%
		16. Persentase kegiatan penataan organisasi (restrukturisasi organisasi)	90%
5.	Tersedianya peraturan perundangan-undangan dibidang SPK	17. Persentase peraturan perundang - undangan di bidang SPK yang ditetapkan	83%
		18. Jumlah produk hukum yang telah ditetapkan oleh Kepala BSN	500 Keputusan
		19. Jumlah kajian peraturan perundang - undangan yang diselesaikan	3 Kajian
6.	Terselenggaranya layanan Pengembangan Hukum, Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum	20. Persentase pemberian bantuan hukum	65%
		21. Jumlah Penyuluhan Hukum bidang SPK	7 Kali
		22. Persentase Peraturan Perundangan yang diunggah	78%
7.	Terinformasikannya Kebijakan, Program, Kegiatan dan Hasil - Hasil BSN Kepada Masyarakat	23. Jumlah pemberitaan SNI dan BSN	1.200 berita
		24. Jumlah Pameran standardisasi yang diikuti BSN	7 Kali
		25. Jumlah Koordinasi Kelembagaan baik internal maupun dengan K/ L, Pemerintah daerah, serta stakeholder lainnya	25 Kali
		26. Jumlah Publikasi Kelembagaan	3 Laporan
		27. Persentase pertanyaan Publik tentang BSN yang direspon ULIP	100%
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVES			
8.	Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi HOH yang profesional	28. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) HOH yang meningkat kompetensinya	100%
		29. Realisasi anggaran HOH	≥ 95%
		30. Persentase pencapaian kinerja HOH	90 %
		31. Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal	100%
		32. Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan internal	100%
		33. Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi Biro HOH	75%
		34. Penerapan Sistem Manajemen Mutu	100%

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Biro HOH BSN menetapkan 8 (delapan) sasaran yang telah disempurnakan dari sasaran sebelumnya, dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, Biro HOH BSN telah melaksanakan 2 (dua) program dengan 5 (Lima) kegiatan.

Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

I. Program Pengembangan Standardisasi Nasional, melalui kegiatan Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dilaksanakan melalui :

Penyusunan dokumen Peraturan Pemerintah (PP) di bidang standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yaitu PP tentang standardisasi dan PP tentang penilaian kesesuaian.

II. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN, melalui kegiatan:

Peningkatan Pelayanan Hukum, Organisasi dan Humas BSN, dilaksanakan melalui :

- a. Koordinasi dan Pembahasan Penyusunan Produk Hukum terkait standardisasi,
- b. Pengelolaan Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum,
- c. Pengembangan Sumber Daya Manusia BSN sesuai analisa kebutuhan,
- d. Publikasi kelembagaan yang berkualitas, dan
- e. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Biro HOH BSN berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan.

III.1 Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Biro HOH BSN, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja.

Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang direncanakan dalam Tahun 2017 berdasarkan Penetapan Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1 Pencapaian Kinerja Biro HOH BSN Tahun 2017

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISAS I	CAPAIAN %
I	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) sebagai pendukung pelaksanaan pengembangan dan pembinaan standardisasi dan penilaian kesesuaian				
1.	Terwujudnya good governance dan clean government	1. Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi	80 nilai	71,79	89,74%
		2. Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan HOH (skala 1-5)	3,7 Nilai	3,36	90,81%
2.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas produk hukum	3. Jumlah peraturan perundang - undangan di bidang SPK	3 dokumen	3 dokumen	77%
3.	Terlaksananya Manajemen ASN BSN untuk mewujudkan SDM yg Profesional.	4. Persentase pemenuhan kebutuhan ASN BSN	80 %	75,38	94,23%
		5. Jumlah Dokumen Pengukuran Kompetensi ASN BSN	2 dokumen	1 dokumen	50%
		6. Persentase pelaksanaan program peningkatan kompetensi personel BSN untuk mendukung pencapaian kinerja BSN	100 %	100%	100%
		7. Jumlah SOP Pengelolaan Kepegawaian	8 Pedoman /SOP	6 Pedoman /SOP	75%
		8. Presentase ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	90%	90%	100%
		9. Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis	90%	90%	100%
		10. Prosentase ASN dengan Nilai Prestasi kerja lebih dari cukup tanpa ada unsur perilaku kerja yg bernilai cukup	95%	97%	102,10%
		11. Jumlah Dokumen Pembentukan JFT Analisis Standardisasi	1 Dokumen	1 Draft Dokumen	50%

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
I	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) sebagai pendukung pelaksanaan pengembangan dan pembinaan standardisasi dan penilaian kesesuaian				
		12. Persentase Penetapan Kenaikan Pangkat	100%	100%	100%
		13. Persentase pegawai yg mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala	100%	100%	100%
		14. Persentase penyelesaian Usulan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Tertentu (JFTI)	100%	70%	70%
4.	Terselenggaranya program penataan Organisasi dan Tata Laksana sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi	15. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi	100%	100%	100%
		16. Persentase kegiatan penataan organisasi (restrukturisasi organisasi)	90%	75%	83,33%
5.	Tersedianya peraturan perundangan-undangan dibidang SPK	17. Persentase peraturan perundang - undangan di bidang SPK yang ditetapkan	83%	91%	110%
		18. Jumlah produk hukum yang telah ditetapkan oleh Kepala BSN	500 Keputusan	626	125%
		19. Jumlah kajian peraturan perundang - undangan yang diselesaikan	3 Kajian	5 kajian	166%
6.	Terselenggaranya layanan Pengembangan Hukum, Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum	20. Persentase pemberian bantuan hukum	65%	5	100%
		21. Jumlah Penyuluhan Hukum bidang SPK	7 Kali	5 Kali	71%
		22. Persentase Peraturan Perundangan yang diunggah	78%	8	100%
7.	Terinformasikannya Kebijakan, Program,	23. Jumlah pemberitaan SNI dan BSN	1.200 berita	3.047 berita	253

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISAS I	CAPAIAN %
I	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) sebagai pendukung pelaksanaan pengembangan dan pembinaan standardisasi dan penilaian kesesuaian				
	Kegiatan dan Hasil – Hasil BSN Kepada Masyarakat	24. Jumlah Pameran standardisasi yang diikuti BSN	7 Kali	12 kali	171
		25. Jumlah Koordinasi Kelembagaan baik internal maupun dengan K/ L, Pemerintah daerah, serta stakeholder lainnya	25 Kali	25 Kali	100
		26. Jumlah Publikasi Kelembagaan	3 Laporan	3 Laporan	100
		27. Persentase pertanyaan Publik tentang BSN yang direspon ULIP	100%	100%	100%
8.	Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi HOH yang profesional	28. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) HOH) yang meningkat kompetensinya	100%	100%	100%
		29. Realisasi anggaran HOH	≥ 95%	94,95%	99,95%
		30. Persentase pencapaian kinerja HOH	90 %	90%	100%
		31. Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal	100%	100%	100%
		32. Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan internal	100%	100%	100%
		33. Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi Biro HOH	75%	75%	100%
		34. Penerapan Sistem Manajemen Mutu	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja untuk masing-masing sasaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

TUJUAN :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai pendukung pelaksanaan pengembangan dan pembinaan standardisasi dan penilaian kesesuaian

Dalam mencapai tujuan tersebut, sasaran yang telah ditetapkan adalah :

1. Terwujudnya good governance dan clean government.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum.
3. Terlaksananya Manajemen ASN BSN untuk mewujudkan SDM yang Profesional.
4. Terselenggaranya program penataan Organisasi dan Tata Laksana sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi.
5. Tersedianya peraturan perundangan-undangan dibidang SPK
6. Terselenggaranya layanan Pengembangan Hukum, Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum.
7. Terinformasikannya Kebijakan, Program, Kegiatan dan Hasil – Hasil BSN Kepada Masyarakat.
8. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi HOH yang profesional.

Pencapaian dari tiap – tiap sasaran diatas dapat dijelaskan sebagai berikut.

SASARAN 1	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government
--------------------------------	---

Tabel III.2 Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Capaian 2016	Capaian 2017		
		Target	Realisasi	Capaian
a. Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi	75,36%	80 nilai	71,79	89,74%
b. Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan HOH (skala 1-5)	3,2	3,7 Nilai	3,36	90,81%

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi BSN tahun 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 belum dapat diketahui. Oleh Karena itu, realisasi dari Tingkat Pelaksanaan RB BSN Tahun 2017 diperoleh dari nilai hasil evaluasi RB Tahun 2016. Dari nilai tersebut dapat dilihat bahwa target yang diharapkan senilai 80 tidak dapat tercapai. Dari hasil evaluasi diketahui bahwa beberapa program RB BSN mengalami penurunan nilai yaitu pada program Manajemen Perubahan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penguatan Akuntabilitas, dan Penguatan Pengawasan. Untuk tahun 2018, perlu dilakukan revisi target capaian karena target yang akan dicapai terlalu tinggi dan penilaian ada di pihak luar (di luar kendali BSN).

Hasil Index kepuasan pegawai terhadap layanan HOH dari target 3,7 hanya mampu mendapatkan realisasi 3,36 atau sebesar 90,81%. Hal ini berarti tidak mencapai target, walaupun jika dibandingkan dengan capaian 2016 index ini mengalami peningkatan. Untuk dapat meningkatkan index kepuasan sesuai target maka Biro HOH akan mereview saran yang masuk dalam survey dan melakukan perbaikan.

SASARAN 2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum
----------------------	---

Tabel III.3 Capaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Capaian 2016	Capaian 2017		
		Target	Realisasi	Capaian
c Jumlah peraturan perundang - undangan di bidang SPK	2 PP 2 RPerpres	3 dokumen	3 dokumen	77%

Tahun 2017 pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum ada 1 (satu) indikator kinerja yang ditetapkan. Dan disatu indikator tersebut ada 3 (tiga) target capaian yaitu ditetapkannya RPP tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Rperpres tentang Organisasi dan Tata Laksana Badan Standardisasi Nasional, Rpermenristekdikti tentang Kebijakan Nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Ketiga target capaian tersebut seharusnya menghasilkan PP tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Perpres tentang Organisasi dan Tata Laksana Badan Standardisasi Nasional, dan selesainya Rancangan Permenristekdikti tentang Kebijakan Nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Target tersebut tidak tercapai karena:

1. RPP tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian masih dalam proses pamarafan di Menteri Koordinator bidang Perekonomian.
2. RPerpres tentang Badan Standardisasi Nasional masih dalam proses penetapan Presiden
3. Rancangan Rpermen Ristek Dikti masih dibahas secara intensif di internal BSN.

Target capaian 3 (tiga) dokumen sampai akhir tahun 2017 tiga dokumen tersebut telah dapat disusun, namun masih terus dalam pembahasan dengan kementerian PAN dan RB serta kementerian terkait. Secara dokumen, target sudah dapat tercapai, namun secara kualitas belum tercapai 100% karena masih dalam penyempurnaan.

Kendala dari pencapaian kualitas capaian ini dibandingkan Tahun 2016 sebelumnya capaian ini mengalami peningkatan. Oleh karena itu langkah tindak lanjut yang akan dilakukan pada Tahun 2017 Bagian Hukum akan terus berupaya:

- a. Untuk percepatan terbitnya PP SSPKN , Bagian Hukum melakukan koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait proses paraf RPP tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
- b. Untuk percepatan terbitnya Permen Ristekdikti, Bagian Hukum mengajukan permohonan Lanjutan Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017 untuk dimasukkan lagi dalam Program Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2018. Dan
- c. Pembahasan di internal BSN untuk memperoleh kesepahaman substansi Rpermen ristekdikti tentang Kebijakan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

SASARAN 3	Terlaksananya Manajemen ASN BSN untuk mewujudkan SDM yang Profesional
----------------------------	--

Tabel III.4 Capaian Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja	Capaian 2016	Capaian 2017		
		Target	Realisasi	Capaian
4. Persentase pemenuhan kebutuhan ASN BSN	77%	80 %	75,38	94,23%
5. Jumlah Dokumen Pengukuran Kompetensi ASN BSN	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	75%
6. Persentase pelaksanaan program peningkatan kompetensi personel BSN untuk mendukung pencapaian kinerja BSN		100 %	100%	100%
7. Jumlah SOP Pengelolaan Kepegawaian	7 draft dokumen	8 Pedoman /SOP	6 Pedoman /SOP	75%

8. Presentase ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Kepemimpinan	50%	90%	67%	74%
9. Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis	78%	90%	90%	100%
10. Prosentase ASN dengan Nilai Prestasi kerja lebih dari cukup tanpa ada unsur perilaku kerja yg bernilai cukup	97%	95%	97%	102,10%
11. Jumlah Dokumen Pembentukan JFT Analisis Standardisasi	1 Dokume	1 Dokumen	1 Draft Dokumen	50%
12. Persentase Penetapan Kenaikan Pangkat	100%	100%	100%	100%
13. Persentase pegawai yg mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala	100%	100%	100%	100%
14. Persentase penyelesaian Usulan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Tertentu (JFTI)	>95%	100%	75%	75%

Tahun 2017 pencapaian sasaran Terlaksananya Manajemen ASN BSN untuk mewujudkan SDM yang Profesional dari 11 (sebelas) indikator kinerja yang ditetapkan target yang tidak mencapai 100% ada 6 (enam) indikator, penyebab dari tidak tercapainya adalah:

1. Untuk pemenuhan kebutuhan ASN tidak dapat dipenuhi karena tidak dilakukan pengadaan CPNS dan beberapa pegawai mengundurkan diri.
2. Dokumen Pengukuran Asesmen Kompetensi. Dari segi jumlah dokumen tercapai adanya 2 dokumen yaitu dokumen Laporan Workshop Asesmen Kompetensi Pegawai dan Dokumen Panduan Asesmen Kompetensi. Karena Dokumen Panduan Asesmen masih dalam bentuk draft, maka tidak dapat dikatakan tercapai 100%, tetapi hanya 75%.
3. Dokumen Pedoman/SOP terkait Kepegawaian yang ditargetkan dapat tersedia sebanyak 8 (delapan) buah, baru dapat dipenuhi 6 (enam) buah.

Rencana Pedoman/SOP yang akan dibuat:

- a. SE Pindah Instansi
- b. SE Pakaian Dinas
- c. SE PPNPN

- d. Pedoman Pendelegasian Wewenang
- e. Pedoman Tugas Belajar dan Ijin Belajar
- f. Panduan Asesmen Kompetensi
- g. Pedoman Penilaian 360 (Revisi)
- h. Pedoman Pola Karir

Untuk Pedoman Penilaian 360 (Revisi) dan Pedoman Pola Karir belum dapat terselesaikan karena keterbatasan sumberdaya yang ada baik dari segi kompetensi maupun waktu.

4. Presentase ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan dari target yang direncanakan yaitu:

Diklatpim II = 1 peserta

Diklatpim III= 1 peserta

Diklatpim IV= 5 peserta

Jadi, total rencana adalah 7 peserta. Dengan asumsi bahwa tidak semua yang diusulkan dapat mengikuti diklatpim diperkirakan 90% (6 peserta) yang dapat mengikuti Diklatpim. Namun karena adanya pemotongan anggaran dan adanya keterbatasan penyedia jasa diklatpim, maka yang dapat ditugaskan untuk mengikuti diklatpim hanya 4 orang yang terdiri Diklatpim III= 1 peserta dan Diklatpim IV= 3 peserta (67%). Jadi, target yang dapat dicapai yaitu 74%.

5. Jumlah Dokumen Pembentukan JFT Analisis Standardisasi. Tidak dapat terselesaikan. Karena keterbatasan sumberdaya di Bagian OK dan Kementerian PAN selaku instansi yang memberikan bimbingan pembentukan JFT Analisis Standardisasi.
6. Penyelesaian Usulan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) hanya tercapai 75% dari target dikarenakan dari 34 Usulan yang diproses, 6 usulan masih dalam proses penilaian di instansi pembina JFT dan 2 usulan yang diajukan mendapat nilai tidak memenuhi syarat.

Terdapat pencapaian indikator yang melebihi dari target semula, yaitu Prosentase ASN dengan Nilai Prestasi kerja lebih dari cukup tanpa ada unsur perilaku kerja yg bernilai cukup. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pembinaan terhadap pegawai di BSN berjalan cukup baik.

Dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2016 yang lalu, terdapat 3 indikator yang mengalami penurunan pencapaian sedangkan indikator sisanya sama atau lebih tinggi.

Oleh karena itu di Tahun mendatang langkah atau upaya yang akan dilaksanakan dalam pencapaian target kinerja adalah :

- a) Koordinasi intensif baik di dalam internal BSN maupun dengan instansi terkait sehingga target yang tidak tercapai dapat dilaksanakan di awal tahun 2018.
- b) Mengajukan usulan kebutuhan pegawai BSN untuk mendukung pelaksanaan tugas BSN

SASARAN 4	Terselenggaranya program penataan Organisasi dan Tata Laksana sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi
----------------------------	---

Tabel III.5 Capaian Kinerja Sasaran 4

Indikator Kinerja	Capaian 2016	Capaian 2017		
		Target	Realisasi	Capaian
15. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi	100%	100%	80%	80%
16. Persentase kegiatan penataan organisasi (restrukturisasi organisasi)	58%	90%	75%	83,33%

Tahun 2017 pencapaian sasaran Terselenggaranya program penataan Organisasi dan Tata Laksana sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi dari 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan belum dapat mencapai 100%.

Rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan RB BSN tahun 2017 belum seluruhnya ditindaklanjuti pada tahun 2016, dikarenakan keterbatasan SDM, waktu, dan anggaran. Rekomendasi yang belum dapat dilaksanakan di tahun 2016 direncanakan dilaksanakan di tahun 2017.

Proses penataan organisasi (restrukturisasi organisasi) tidak dapat mencapai target dikarenakan Rperpres yang diajukan belum ditetapkan

Dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2016 yang lalu capaian kinerja Tahun 2017 ini mengalami peningkatan ini disebabkan Rperpres telah disepakati oleh kementerian/lembaga terkait dan diajukan untuk ditandatangani oleh Presiden.

Oleh karena itu di Tahun mendatang langkah atau upaya yang akan dilaksanakan dalam pencapaian target kinerja adalah :

- a) Mereview roadmap Reformasi Birokrasi BSN dan program kerja di 8 area perubahan
- b) Melakukan pemantauan berkala terhadap jalannya reformasi birokrasi
- c) Koordinasi intensif dengan Kementerian dan Lembaga terkait.

SASARAN	Tersedianya peraturan perundangan-undangan dibidang SPK
5	

Tabel III.6 Capaian Kinerja Sasaran 5

Indikator Kinerja	Capaian 2016	Capaian 2017		
		Target	Realisasi	Capaian
17. Persentase peraturan perundang - undangan di bidang SPK yang ditetapkan	47%	83%	91%	110%
18. Jumlah produk hukum yang telah ditetapkan oleh Kepala BSN		500 Keputusan	626	125%
19. Jumlah kajian peraturan perundang -undangan yang diselesaikan	3 Kajian	3 Kajian	5 Kajian	166%
Persentase waktu penyelesaian SK Penetapan SNI	100%			

Tahun 2017 pencapaian sasaran Tersedianya peraturan perundang-undangan dibidang SPK indikator kerjanya belum mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2017 disebabkan karena :

- a) Adanya pencabutan permohonan penetapan Rancangan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional oleh unit pengusul;
- b) Kurangnya SDM Bagian Hukum;
- c) Pembahasan RPP tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang menjadi Indikator Utama BSN.

Sehingga sampai dengan akhir Tahun 2017 pencapaian dari indikator kinerja diatas adalah sebesar 94,5% dari target penetapan 100%

Oleh karena itu Tahun 2018 Biro HOH khususnya bagian hukum sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja tersebut diatas akan dilakukan :

- 1) Menerapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan BSN, terutama pembentukan Peraturan Kepala BSN.
- 2) Melakukan evaluasi dari hasil monitoring penyusunan Raperka BSN Tahun 2017 terhadap usulan Rperka BSN dari unit internal BSN.
- 3) Memonitor progres penyusunan Raperka BSN Tahun 2018 berdasarkan usulan unit pengusul Rperka BSN yang termasuk Program Penyusunan Perka BSN Tahun 2018 maupun yang diluar Program Penyusunan.
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan unit-unit kerja pengusul dalam menyelesaikan penyusunan Peraturan Kepala BSN yang diusulkan.
- 5) Melakukan evaluasi akhir terhadap proses pembentukan Perka BSN pada tahun berjalan sebagai bahan pertimbangan penyusunan perencanaan pembentukan Perka BSN tahun berikutnya.

SASARAN 6	Terselenggaranya layanan Pengembangan Hukum, Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum
----------------------	--

Tabel III.7 Capaian Kinerja Sasaran 6

Indikator Kinerja	Capaian 2016	Capaian 2017		
		Target	Realisasi	Capaian
20. Persentase pemberian bantuan hukum	100%	65%	72%	110%
21. Jumlah Penyuluhan Hukum bidang SPK	3 Kali	7 Kali	7 Kali	100%
22. Persentase Peraturan Perundangan yang diunggah	10%	78%	86%	110%

Tahun 2017 pencapaian sasaran Terselenggaranya layanan Pengembangan Hukum, Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum untuk ketiga indikator kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2017 ini yaitu 100%, hal ini disebabkan karena :

- a) Jumlah penyuluhan hukum yang semula direncanakan sebanyak 7 kali, hanya dapat dilakukan sebanyak 5 kali dikarenakan pemotongan anggaran khususnya pada Bagian Hukum sebagai tindak lanjut Inpres No. 4 Tahun 2014 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian / Lembaga dalam pelaksanaan Anggaran Belanja 2017.
- b) Redesain aplikasi JDIIH yang baru selesai dilaksanakan pada akhir Tahun 2017. Disamping itu, terdapat kendala keterbatasan infrastruktur.
- c) Pendukung aplikasi untuk updating *database* dokumentasi dan informasi hukum yang diunggah di aplikasi JDIIH BSN.

Sehingga sampai dengan akhir Tahun 2017 pencapaian dari indikator kinerja diatas adalah sebesar 106% dari target penetapan 100%

Oleh karena itu Tahun 2018 Biro HOH khususnya bagian hukum sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja tersebut diatas akan dilakukan :

- 1) Melakukan perencanaan kegiatan yang lebih terkoordinasi dengan baik.
- 2) Melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi penghematan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2018.
- 3) Membuat draf SOP Pemberian Bantuan Hukum.
- 4) melakukan perencanaan target dan jadwal pengunggahan peraturan dan keputusan kepala BSN serta informasi hukum lainnya yang ditetapkan sekurang-kurangnya pada tahun 2015, 2016, dan 2017.

SASARAN 7	Terinformasikannya Kebijakan, Program, Kegiatan dan Hasil - Hasil BSN Kepada Masyarakat
----------------------------	--

Tabel III.8 Capaian Kinerja Sasaran 7

Indikator Kinerja	Capaian 2016	Capaian 2017		
		Target	Realisasi	Capaian
22. Jumlah pemberitaan SNI dan BSN	4.238 berita	1.200 berita	3.0473 berita	253%
23. Jumlah Pameran standardisasi yang diikuti BSN	10 Kali	7 Kali	12 Kali	171%
24. Jumlah Koordinasi Kelembagaan baik internal maupun dengan K/L, Pemerintah daerah, serta stakeholder lainnya	23 Kali	25 Kali	25 kali	100%
25. Jumlah Publikasi Kelembagaan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%
26. Persentase pertanyaan Publik tentang BSN yang direspon ULIP	90%	100%	100%	100%

Tahun 2017 pencapaian sasaran Terinformasikannya Kebijakan, Program, Kegiatan dan hasil - hasil BSN Kepada Masyarakat untuk kelima indikator kinerjanya keseluruhannya melampaui target yang telah ditetapkan pada Tahun 2016 ini yaitu diatas 100%.

Pencapaian yang melampaui target 100% dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu :

1. Pemberitaan SNI ternyata banyak disuarakan oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengawas Obat dan Makanan, beberapa industri penerap SNI dan stakeholder lainnya.
2. BSN dan pemangku kepentingan bersinergi dalam penyelenggaraan pameran sehingga biaya sewa pameran ditanggung pemangku kepentingan, serta dukungan pemangku kepentingan juga menyebabkan sosialisasi SNI dan kelembagaan BSN semakin gencar.
3. Setelah UU No.20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian ditetapkan keberadaan BSN sudah mulai diketahui banyak pihak sehingga beberapa pemangku kepentingan datang untuk melakukan koordinasi dengan BSN.

Dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2016 yang lalu capaian kinerja Tahun 2017 ini mengalami kenaikan disebabkan oleh lebih dioptimalkannya sinergitas BSN dengan para pemangku kepentingan sehingga kelembagaan BSN lebih banyak diketahui oleh masyarakat.

Sehingga sampai dengan akhir Tahun 2017 pencapaian dari kelima indikator kinerja diatas adalah sebesar 144,8% dari target penetapan 100%.

Oleh karena itu Tahun 2018 Biro HOH khususnya bagian humas sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja tersebut diatas akan terus dilakukan sinergitas kelembagaan BSN dengan para pemangku kepentingan dan menggunakan seluruh media dan jaringan yang dimiliki oleh BSN.

SASARAN 8	Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi HOH yang profesional
----------------------------	---

Tabel III.9 Capaian Kinerja Sasaran 8

Indikator Kinerja	Capaian 2016	Capaian 2017		
		Target	Realisasi	Capaian
28. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN HOH) yang meningkat kompetensinya	100%	100%	100%	100%
29. Realisasi anggaran HOH	98%	≥ 95%	94,95%	99,95%
30. Persentase pencapaian kinerja HOH	90 %	90 %	90%	100%
31. Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal	100%	100%	100%	100%
32. Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan internal	100%	100%	100%	100%
33. Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi Biro HOH	75%	75%	75%	100%
34. Penerapan Sistem Manajemen Mutu	90%	100%	100%	100%
35. Jumlah e-governance yang mendukung tata kelola HOH	7 Aplikasi			

Tahun 2017 pencapaian sasaran meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi HOH yang profesional secara total mencapai presentasi kinerja sebesar 100% dari target 100%

Dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2016 yang lalu capaian kinerja Tahun 2017 ini mengalami penurunan untuk realisasi anggaran ini dikarenakan berkurangnya SDM kehumasan yang sedang mengikuti tugas belajar, perbantuan personel untuk kantor layanan teknis.

Oleh karena itu pada Tahun 2018 untuk meningkatkan kinerja yang belum mencapai 100% akan dilakukan upaya yaitu perekrutan tenaga CPNS untuk menutupi kekurangan SDM kehumasan.

III.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada Tahun 2017 ini Biro HOH BSN didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016. Berdasarkan DIPA Nomor DIPA-084.01.1.613104/2017 tanggal 14 Nopember 2016, pagu anggaran Biro HOH BSN sebesar Rp. **12.088.623.000,-** dan realisasi anggaran Biro HOH BSN Tahun 2016 adalah sebesar Rp. **11.477.677.351,-** atau sebesar **94.95%**.

Pagu dan realisasi anggaran Biro HOH BSN Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.10 Pagu dan Realisasi Anggaran Biro HOH BSN TA. 2017

Dalam rupiah

No	Uraian	2017		
		Pagu	Realisasi	%
1	Bagian Hukum	1,877,254,000	1,798,674,626	95.81%
	a. Produk Hukum	422,201,000	397,738,000	
	b. Terwujudnya peraturan perundang - undangan dibidang standardisasi dan penilaian kesesuaian	1,455,053,000	1.400.936.626	
2	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	6,860,077,000	6,720,291,054	97.96%
	a. Terwujudnya Paket Pengembangan SDM sesuai analis kebutuhan	4,206,596,000	4,105,633,480	
	b. Laporan Capaian Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi	2,653,481,000	2,614,657,574	
3	Bagian Humas	3,351,292,000	2,958,711,671	88.29%
	a. Paket Publikasi Kelembagaan Yang berkualitas	3,351,292,000	2,958,711,671	
	Jumlah	12,088,623,000	11,477,677,351	94.95%

Perbandingan dengan Tahun 2016

No	Uraian	Realisasi	
		2016	2017
1	Bagian Hukum	4.115.492.352	1.798.674.626
	a. Produk Hukum	117.234.000	397.738.000
	b. Terwujudnya Peraturan perundang - undangan dibidang standardisasi dan penilaian kesesuaian	1.442.892.400	1.400.936.626
2	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	2.289.602.100	6.720.291.054
	a. Terwujudnya Paket Pengembangan SDM sesuai analis kebutuhan	1.200.337.200	4.105.633.480
	b. Laporan Capaian Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi	1.089.264.900	2.614.657.574
3	Bagian Humas	1.082.408.515	2.958.711.671
	a. Paket Publikasi Kelembagaan Yang berkualitas	1.082.408.515	2.958.711.671
	Jumlah	4.932.137.015	11.477.677.351

BAB IV PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja Biro Hukum, Organisasi, dan Humas (HOH) BSN Tahun 2016 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Biro HOH Tahun 2016 dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Biro HOH BSN Tahun 2016, sebagian besar kegiatan telah terlaksana sesuai penetapan kinerja dan indikator kinerja, telah dapat diselesaikan dari target yang ditetapkan. Terlaksananya seluruh kegiatan di Biro HOH BSN sangat mendukung pelaksanaan kegiatan teknis lingkup Badan Standardisasi Nasional, sesuai tugas fungsi Biro HOH BSN sebagai fasilitasi dan koordinasi.

Walaupun demikian, masih ditemukan berbagai kelemahan dan sebagian kecil kegiatan yang belum memenuhi target. Hal ini akan dijadikan input untuk perbaikan kegiatan Biro HOH BSN di tahun-tahun berikutnya.